

S.I.
654.15
und
Am/2

D/SET/1984/008

12

**MEKANISME KERJASAMA DALAM PENGADAAN BAHAN
SIARAN PEDESAAN RRI STASION
REGIONAL II BOGOR**

KARYA ILMIAH

CUT YULIA ANDRIANI



FAKULTAS PETERNAKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1984

RINGKASAN

CUT YULIA INDRIANI, 1984. Mekanisme Kerjasama dalam Pengadaan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasion Regional II Bogor. Karya Ilmiah Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

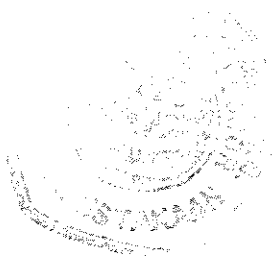
Pembimbing Utama : Dr. Pang Soeparman Asngari

Pembimbing Anggota : Ir. Said Rusli, MA

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1983 sampai dengan 10 Januari 1984. Tujuannya adalah untuk melihat dan menganalisa mekanisme kerjasama diantara RRI sebagai pihak penyelenggara siaran, instansi/dinas dan lembaga, PPL/JUPEN dan tokoh masyarakat sebagai pihak pendukung serta kelompok pendengar sebagai sasaran, dalam pengadaan bahan siaran pedesaan RRI stasion regional II Bogor.

Metoda penelitian yang digunakan adalah studi kasus Siaran Pedesaan di RRI stasion regional II Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan responden dan penggunaan data sekunder. Data diolah secara tabulasi dan dianalisa secara kualitatif. Parameter yang diukur adalah (1) keikutsertaan instansi/dinas dan lembaga, RRI, PPL/JUPEN dan tokoh masyarakat dalam pengadaan bahan siaran pedesaan, (2) keikutsertaan kelompok pendengar dalam pengadaan bahan siaran pedesaan, dan (3) kesesuaian materi siaran pedesaan dengan kebutuhan kelompok pendengar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kerjasama yang terjadi selama ini antara pihak penyelenggara, pihak pendukung dan sasaran siaran pedesaan, sudah berjalan dengan baik. Akibat dari pada itu, materi siaran yang dihasilkan juga dapat memenuhi kebutuhan pasaran. Hal ini dapat dilihat dari materi siaran yang telah disiarkan oleh RRI stasion regional II Bogor, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kelompok pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.



MEKANISME KERJASAMA DALAM PENGADAAN BAHAN
SIARAN PEDESAAN RRI STASION
REGIONAL II BOGOR

Karya Ilmiah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Peternakan

Oleh

CUT YULIA INDRIANI

FAKULTAS PETERNAKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1 9 8 4


MEKANISME KERJASAMA DALAM PENGADAAN BAHAN
SIARAN PEDESAAN RRI STASION
REGIONAL II BOGOR

Oleh

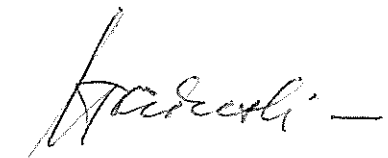
CUT YULIA INDRIANI

D15.0403

Karya Ilmiah ini telah disetujui dan disidangkan
dihadapan Komisi Ujian Lisan pada tanggal 1 Februari 1984



Dr. Pang Soeparman Asngari
Pembimbing Utama




Ir. Said Rusli, MA
Pembimbing Anggota

Ketua Jurusan


Sosial Ekonomi Peternakan
Fakultas Peternakan
Institut Pertanian Bogor

Dekan

Fakultas Peternakan
Institut Pertanian Bogor



(Dr. Pang Soeparman Asngari)



(Dr. B. Eddie Gurnadi)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Juli 1959. Penulis adalah anak pertama dari enam bersaudara, dengan ayah Teuku Alamsyah dan ibu R.A. Soesiati.

Tahun 1971 penulis lulus dari SD Persit I Kartika Chandra Kirana, Banda Aceh dan lulus dari SMP Negeri II Banda Aceh pada tahun 1974. Pada tahun 1975 penulis masuk di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Darussalam, Banda Aceh, dan lulus pada tahun 1977.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Tingkat Persiapan Bersama di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1978 melalui Proyek Perintis II. Tahun 1980, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi ; karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulisan Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan.

Kepada Bapak Dr. Pang Soeparman Asngari, selaku dosen pembimbing utama, dan Bapak Ir. Said Rusli, MA selaku dosen pembimbing anggota, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengarahan, bimbingan dan saran-saran selama penulis melakukan penelitian hingga kemudian tersusun dalam bentuk Karya Ilmiah ini

Rasa terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Ir. Maman Duldjaman dan Bapak Ir. Djamil Hasymi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi penilai penulis pada ujian Sidang Sarjana.

Sembah sujud dengan cinta kasih dan keharuan yang mendalam, penulis haturkan keharibaan ayah dan ibu, kehadapan adik-adik dan mas Dadang tercinta. Berkat do'a , dorongan dan pengorbanan engkau jualah Karya Ilmiah ini dapat terwujud. Sudah sepantasnyalah Karya Ilmiah ini penulis persembahkan untukmu semua.

Tak terlupakan pula penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada sahabatku Anon sekeluarga, Bapak-bapak dari DPSP Kabupaten Bogor dan RRI stasiun regional II Bogor, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan.

Harapan penulis, semogalah Karya Ilmiah ini dapat berguna bagi diri penulis maupun bagi semua pihak yang membutuhkan serta untuk perbaikan/penyempurnaan penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya, segala puja dan puji bagi Allah S.W.T.
jua.

Bogor, Januari 1984

Cut Yulia Indriani

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PENDAHULUAN	1
TINJAUAN PUSTAKA	8
Peranan Media Massa dalam Pembangunan	8
Radio sebagai Media Penyuluhan	10
Kebijaksanaan Program Siaran Pedesaan	13
MATERI DAN METODA PENELITIAN	17
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
Siaran Pedesaan RRI Stasion Regional II Bogor	20
Keikutsertaan Instansi/Dinas dan Lembaga, RRI PPL/JUPEN dan Tokoh Masyarakat dalam Pengada- an Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasion Regional II Bogor	25
Keikutsertaan Kelompok Pendengar dalam Penga- daan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasion Regio- nal II Bogor	33
Kesesuaian Materi Siaran Pedesaan dengan Kebutuhan Kelompok Pendengar	35
Mekanisme Penyusunan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasion Regional II Bogor	39
Potensi dan Hambatan-hambatan pada Mekanisme Kerjasama dalam Pengadaan Bahan Siaran Pede- saan RRI Stasion Regional II Bogor	42
KESIMPULAN	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Persentase materi yang disiarkan berdasarkan klasifikasi masalah periode Maret 1981 sampai dengan Februari 1983	22
2.	Jumlah pertemuan/rapat BP-Harian DPSP Kabupaten DT II Bogor periode Maret 1981 - Februari 1983	25
3.	Frekuensi penyediaan naskah siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor menurut sumber Periode Maret 1981 sampai Februari 1983	27
4.	Frekuensi penyediaan bahan siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor oleh instansi/dinas dan lembaga pertanian	29
5.	Jumlah tenaga penyiar siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor menurut sumber periode Maret 1981 - Februari 1983	32
6.	Frekuensi kehadiran dalam lima kali pertemuan BP-Harian DPSP Maret 1981 - Februari 1983 ...	34
7.	Perkembangan jumlah kelompok pendengar siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, 1981-1983	35
8.	Jumlah kelompok pendengar siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor berdasarkan macam kegiatan tahun 1981	37
9.	Jumlah kelompok pendengar siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor berdasarkan jenis kegiatannya tahun 1981	37

Lampiran

1.	Persentase penyiaran materi siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor	51
2.	Daftar anggota penanggungjawab penyelenggara acara siaran pedesaan melalui RRI Stasiun Regional II Bogor dalam Badan Pelaksana Harian Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP) Kabupaten DT II Bogor	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Mekanisme penyusunan bahan siaran pedesaan RRI stasion regional II Bogor	42

Lampiran

1.	Struktur organisasi dan tata kerja DPSP Kabupaten DT II Bogor	53
----	--	----

PENDAHULUAN

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pada pembangunan pertanian, sedangkan pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Secara umum, pola pembangunan Indonesia menempatkan pedesaan sebagai dasar wilayah, dan penerapan teknologi sebagai sarana pembangunan. Pembangunan pedesaan mencakup proses perubahan sikap masyarakat pedesaan, yang diarahkan kepada perubahan sikap yang mendorong pembangunan.

Berdasarkan data sensus tahun 1980, 78% penduduk Indonesia berada di pedesaan. Mata pencaharian utamanya adalah pertanian, termasuk pula peternakan. Tepatlah bila bermacam cara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan pertanian.

Peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan, dalam hal ketrampilan dan pengetahuan, perlu digalakkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang tersedia secara optimal melalui penyuluhan - penyuluhan. Dengan ini diharapkan dapat mendorong prakarsa, inovasi dan kreatifitas penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup dan lingkungannya.

Dalam proses penyuluhan, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Penyebaran pesan-pesan pembangunan ke pedesaan, menuntut peningkatan sarana komunikasi yang dapat menjangkau sasaran yang jauh di pelosok desa. Untuk tujuan ini, peranan dan fungsi media massa, khususnya radio, sebagai sarana komunikasi ke desa, dirasakan sangat penting.

Komunikasi pertanian, tercakup didalamnya komunikasi di sub sektor peternakan, adalah proses penyampaian informasi tentang pertanian secara umum kepada para petani/peternak, melalui pusat-pusat penyebaranteknologi dan media yang ada. Dengan meningkatkan peranan dan fungsi media massa sebagai sarana komunikasi pertanian, masyarakat petani/peternak diharapkan selalu dapat mengetahui perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang pertanian. Masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya informasi yang masuk ke pedesaan.

Berhasilnya pembangunan peternakan (dan juga pertanian secara umum), tidak terlepas dari usaha-usaha penyuluhan yang terarah dan benar, yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan.

Penyebaran teknologi baru melalui penyuluhan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan terhadap sasaran penyuluhan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda penyuluhan. Metoda penyuluhan yang dikenal adalah dalam bentuk komunikasi tatap muka dan komunikasi media massa.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, terdapat ketimpangan informasi dalam sistem komunikasi mereka. Hal ini terutama diakibatkan karena terpusatnya media massa modern di kota-kota besar, sedangkan masyarakat desa lebih mengandalkan kepada komunikasi antar pribadi/komunikasi tatap muka dalam sistem komunikasi mereka. Dengan hanya mengandalkan komunikasi antar pribadi, tujuan penyampaian pesan-pesan pembangunan ke pedesaan secara

merata sulit dicapai. Hal ini terutama karena adanya hambatan-hambatan yang menyangkut faktor-faktor : transportasi, waktu, biaya, geografis, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta terbatasnya tenaga penyuluh pertanian.

Radio sebagai salah satu media massa yang bersifat "audio", bukan merupakan barang baru bagi masyarakat pedesaan. Komunikasi melalui radio dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan banyak, karena radio dapat menjangkau semua lapisan dalam masyarakat dan dapat mencapai pendengar dalam jumlah besar dan lebih cepat dari pada sarana komunikasi yang lain.

Pemanfaatan radio sebagai salah satu metoda penyuluhan dan pendidikan, dewasa ini sangat digalakkan melalui program Siaran Pedesaan. Melalui program ini, usaha-usaha penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat desa diharapkan dapat dilaksanakan secara intensif.

Siaran pedesaan adalah siaran khusus yang ditujukan kepada pendengar di pedesaan, terutama para petani/peternak dan keluaraganya. Secara umum, materi siaran pedesaan mencakup masalah pertanian dan non pertanian, yang ada hubungannya dengan kehidupan keluarga petani di pedesaan, sedangkan bentuk penyiarannya dapat berupa uraian, obrolan ataupun dalam bentuk sandiwara radio.

Untuk mendukung dan mengefektifkan pengaruh acara siaran pedesaan, dibentuk kelompok-kelompok pendengar acara siaran pedesaan, sebagai kelompok sasaran penyuluhan.

Tujuan pembentukan kelompok pendengar adalah agar supaya para anggotanya secara berkala dapat bertemu dan memanfaatkan pengalaman belajar mereka dengan mendengarkan dan mendiskusikan isi siaran pedesaan dan kemudian menggerakkan diri untuk melaksanakan inovasi yang telah mereka dengar dan diskusikan.

Sebagai alat informasi ke pedesaan, siaran pedesaan haruslah berisi hal-hal yang berhubungan atau berorientasi pada mata pencaharian sebagian besar penduduk pedesaan yaitu : bidang pertanian/peternakan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan suatu mekanisme kerjasama yang baik diantara penyelenggara siaran pedesaan dengan sasaran, yaitu kelompok pendengar. Kerjasama yang baik juga harus terjalin diantara pihak-pihak pendukung program siaran pedesaan, yaitu instansi-instansi atau dinas-dinas yang tergabung dalam Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP), maupun kerjasama antara pihak pendukung dengan pemuka-pemuka masyarakat dan sasaran/kelompok pendengar.

Mekanisme kerjasama ini dilakukan dalam usaha melahirkan suatu materi siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/sasaran.

Keberhasilan siaran pedesaan tergantung dari keserasian kerjasama antara (1) penyelenggara/pengelola siaran pedesaan sebagai produsen acara siaran pedesaan dan pengatur waktu siaran; (2) kelompok pendengar, sebagai penerima pesan-pesan siaran pedesaan untuk didiskusikan bersama menjabarkan dan menerapkannya sebagai bentuk kegiatan

kelompok atau anggota kelompok, dalam rangka pengembangan pedesaan dan pembangunan pertanian serta sebagai umpan balik bagi pengelola siaran pedesaan; dan (3) penyuluh lapangan sebagai pembina langsung kelompok pendengar.

Pembinaan terhadap sasaran penyuluhan, yaitu kelompok pendengar, dilakukan oleh penyelenggara/pengelola siaran pedesaan dan penyuluh pertanian lapangan (PPL); sedangkan dari kelompok pendengar diharapkan adanya umpan balik bagi pengelola siaran pedesaan maupun bagi PPL. Selain itu, umpan balik bagi pengelola juga diperoleh dari para PPL antara lain berupa laporan perkembangan dan kegiatan kelompok pendengar.

Sebagai siaran pendidikan, maka isi siaran pedesaan haruslah dapat merubah perilaku masyarakat pedesaan ke arah tujuan pembangunan. Isi siaran pedesaan, dengan demikian, haruslah memenuhi keinginan masyarakat, tanpa menyimpang dari program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Mengingat adanya keinginan yang beragam dari masyarakat, masing-masing merupakan perwujudan dari keragaman segi-segi kehidupan dan perkembangan pengalaman, isi siaran pedesaan haruslah mampu memenuhi beragam keinginan tersebut secara proporsional. Apakah isi siaran pedesaan sudah mampu memenuhi beragam keinginan tersebut secara proporsional, hal ini dapat dilihat dari penilaian pemimpin-pemimpin/tokokh-tokoh masyarakat setempat, terutama pemimpin kelompok pendengar.

Program pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah merupakan paduan dari program-program pembangunan sektor-sektor, yang dirancang oleh instansi-instansi pada berbagai tingkat pemerintah. Dalam pelaksanaan siaran pedesaan instansi-instansi tersebut seharusnya mendapat kesempatan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengemukakan arahan pembangunan bagi sektornya masing-masing. Apakah kesempatan ini memang benar ada, dapat dilihat dari status mereka dalam struktur lembaga yang memproduksi dan membina siaran pedesaan serta mekanisme kerja yang ditetapkan dalam lembaga tersebut. Apakah kesempatan ini mereka gunakan, dapat dilihat dari peranan yang dilakukan oleh instansi-instansi/dinas-dinas dan lembaga tersebut dalam memproduksi siaran pedesaan. Sampai sejauh mana instansi/dinas dan lembaga tersebut berperan dalam penyediaan materi siaran, dapat dilihat dari frekuensi penyediaan materi siaran oleh instansi/dinas atau lembaga yang bersangkutan.

Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai pelaksana siaran pedesaan, dituntut untuk aktif mengadakan pendekatan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan siaran pedesaan. Disamping itu, RRI harus mampu pula mengetahui keragaman keinginan masyarakat pedesaan dan kemudian disusun menurut prioritas sesuai dengan proporsinya. Sebagai pembina terdepan, PPL dan juru penerang (JUPEN) dapat membantu petugas-petugas RRI dalam menyusun materi siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat., dalam hal ini adalah kelompok pendengar. Sampai sejauh mana

kerjasama ini terjalin dapat dilihat dari frekuensi bertemu antara petugas RRI dan PPL/JUPEN. Disamping itu, peranan aktif petugas RRI dalam usaha penyesuaian materi siaran dengan kebutuhan masyarakat, dapat dilihat dari intensitas kunjungan petugas yang bersangkutan kepada pemimpin ataupun anggota kelompok pendengar.

Hipotesis yang dikemukakan adalah : bahwa semakin baik dan lancar mekanisme kerjasama yang terjalin, maka semakin baik pula materi siaran yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa mekanisme kerjasama diantara RRI sebagai pihak penyelenggara siaran; instansi/dinas atau lembaga, PPL/JUPEN dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pihak pendukung serta kelompok pendengar sebagai sasaran program siaran pedesaan. Mekanisme kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal pengadaan bahan siaran pedesaan di RRI Stasiun Regional II Bogor.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk penyempurnaan lebih lanjut, bagi mekanisme kerjasama diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program siaran pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan Media Massa dalam Pembangunan

Schoorl (1981) menyebutkan bahwa untuk mengintegrasikan masyarakat pedesaan kedalam masyarakat regional, nasional dan internasional, yang penting adalah memasukkannya kedalam jaringan komunikasi massa. Melalui jaringan seperti ini, informasi dapat disampaikan kepada dan diterima oleh masyarakat yang lebih luas.

Schramm (Depari, 1978) menyebutkan bahwa peranan media massa dalam pembangunan nasional adalah sebagai pembawa pembaharuan (agent of social change). Letak perannya adalah dalam membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang moderen. Media massa sebagai media komunikasi berfungsi sebagai :

1. Pemberi informasi ; dalam hal ini, fungsi menyampaikan informasi dapat dilakukan sendiri oleh media. Tanpa media, sangat mustahil informasi dapat disampaikan secara cepat tanpa terikat oleh waktu seperti yang senantiasa diharapkan oleh negara-negara yang sedang berkembang.
2. Pengambil keputusan ; dalam hal ini media massa berperan sebagai penunjang. Fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan mengambil keputusan. Oleh sebab itu mekanisme komunikasi antar pribadi sangat berperan. Media massa berperan dalam mengantarkan informasi sebagai bahan diskusi, menyampaikan pesan-pesan para pemuka masyarakat serta

memperjelas masalah yang disampaikan.

3. Pendidik ; sebagian dapat dilakukan sendiri oleh media massa dan sebagian lagi digabungkan dengan komunikasi antar pribadi.

Disamping itu, media massa juga dapat memperpendek jarak yang jauh, memperjelas hal-hal yang kabur, menjembatani peralihan antara masyarakat yang tradisional kearah masyarakat yang moderen, dan mampu menumbuhkan aspirasi yang berguna dalam mewujudkan pembangunan.

Rogers dan Shoemaker (1971) mengemukakan bahwa pengaruh media massa moderen terhadap petani di negara-negara sedang berkembang, akan lebih besar manfaatnya jika media massa moderen tersebut dipadukan dengan saluran-saluran komunikasi antar pribadi/tatap muka. Dalam proses pembaharuan masyarakat, media massa moderen lebih penting artinya dalam fungsi persuasif. Disebutkan pula bahwa media massa efektif dalam kecepatan mencakup masyarakat banyak, mampu membangkitkan kesadaran, minat serta perubahan sikap.

Radio Sebagai Media Penyuluhan

Menurut Slamet dan Asngari (1969), salah satu cara untuk mempercepat jalannya pembangunan peternakan adalah melalui penyuluhan. Hal ini sejalan dengan tugas utama penyuluhan yaitu untuk mendinamisasikan petani/peternak, dengan jalan memperkenalkan teknologi baru yang sesuai, menuju perbaikan tingkat hidup petani/peternak. Usaha-usaha penyuluhan pertanian meliputi pula menggerakkan petani/peternak mengambil bagian aktif dalam pembangunan.

Menurut Wiriaatmadja (1979), penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan diluar sekolah untuk keluarga petani di pedesaan. Keluarga petani sebagai sasaran penyuluhan pertanian, belajar sambil berbuat agar tahu dan mampu menyelesaikan masalah masalah yang dihadapinya. Leagans (Gunardi, 1981) berpendapat bahwa tugas pengajaran penyuluhan adalah membantu orang memperoleh pandangan yang jelas tentang apa yang dapat dan yang harus diperbuat, serta kemudian membantu mereka dengan cara dan sarana untuk melaksanakannya. Disamping itu, agar orang dapat mencapai aspirasinya dalam memperbaiki kehidupannya, diperlukan keyakinan bahwa orang mampu menolong dirinya sendiri. Pengajaran penyuluhan adalah seni mendorong orang agar mau memperbaiki seluruh pola hidupnya serta membantu mereka mewujudkan kehendak tersebut.

Dalam proses penyuluhan, komunikasi memegang peranan yang besar. Slamet dan Asngari (1969) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses perhubungan antar orang,

yang diwujudkan dengan adanya proses pendekatan dan proses penyampaian, antara orang yang berhubungan tersebut. Proses komunikasi ini menurut Leagans (Gunardi, 1981) adalah proses pertukaran gagasan, pikiran, perasaan, atau kesan antara dua orang atau lebih, sehingga masing-masing mendapat pengertian yang sama tentang arti dan maksud pesan. Havelock (Wuradji, 1980) menyebutkan 3 (tiga) strategi komunikasi, yaitu :

1. Komunikasi satu arah dari sumber
2. Komunikasi satu arah dari penerima
3. Komunikasi dua arah dari penerima dan sumber.

Hal ini tampaknya dapat disejajarkan dengan media komunikasi yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1971), yang menggolongkan komunikasi dalam tiga bentuk, yaitu : (1) media massa, (2) hubungan tatap muka, dan (3) media forum.

Radio adalah salah satu media massa moderen. Komunikasi melalui radio merupakan proses komunikasi satu arah. Akan tetapi menurut Hilbrink (Depari, 1978), radio dapat menumbuhkan kesadaran pembangunan dan merangsang rasa keterlibatan. Disamping itu, disebutkan pula bahwa radio sebagai media penyuluhan mempunyai keterbatasan dalam hal pemberian informasi. Pemberi informasi (penyiar) tidak dapat melihat dan menilai langsung respon dari pendengarannya. Informasi yang diberikan terbatas hanya pada bentuk uraian, tanpa peragaan untuk memperjelas maksudnya. Untuk mengatasi hal ini, menurut Lazarsfeld (1960) perlu bentuk komunikasi tambahan, yang berupa komunikasi tatap muka

(komunikasi interpersonal/antar pribadi). Lain halnya dengan media Televisi (TV). Melalui media ini, penonton TV dapat mendengar dan melihat secara langsung materi siaran yang disampaikan. Tetapi media TV ini masih merupakan barang mewah untuk konsumsi masyarakat desa, sehingga pemanfaatannya sebagai media komunikasi, pendidikan dan penyuluhan masih perlu dipertimbangkan.

Sebagai forum komunikasi massa, siaran pedesaan yang diselenggarakan melalui radio, berperan menunjang kegiatan penyuluhan pertanian pada umumnya. Siaran pedesaan adalah merupakan tindak lanjut dari kebijaksanaan pemerintah dalam memanfaatkan media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi. Diharapkan, siaran pedesaan dapat menjadi sumber penerangan, baik hal-hal yang berhubungan dengan pertanian maupun bukan (Vitayala, 1974).

Dalam laporan tahunan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat tahun 1982/1983, ditegaskan bahwa pembinaan siaran pedesaan bertujuan untuk : (1) memberikan informasi teknis peternakan melalui siaran radio bagi para peternak yang belum terjangkau secara langsung oleh petugas penyuluh peternakan, (2) mendorong petani/peternak untuk membentuk kelompok-kelompok pendengar siaran pedesaan, dan (3) mendorong kelompok-kelompok pendengar siaran pedesaan yang sudah ada untuk lebih berprestasi. Adapun manfaat yang didapat dengan adanya siaran pedesaan ini adalah : (1) para petani/peternak dapat menerima informasi teknis peternakan melalui siaran pedesaan, (2) meningkatkan

kerjasama diantara petani/peternak melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam dan oleh kelompok pendengar dan (3) terciptanya informasi antara petani/peternak dan pemerintah.

Kebijaksanaan Program Siaran Pedesaan

Pembangunan harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah kepada masyarakat pedesaan. Untuk terlaksananya pembangunan tersebut, diperlukan informasi yang dapat menunjang pembangunan. Disamping itu, arus informasi inipun harus teratur dan terus menerus.

Penyampaian informasi yang paling efektif adalah melalui komunikasi interpersonal/tatap muka, terutama di pedesaan. Tetapi keadaan ini menuntut adanya tenaga-tenaga penyuluh yang secara aktif datang ke pedesaan untuk menyampaikan informasi-informasi dan usaha-usaha penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dibandingkan dengan jumlah desa yang menjadi sasaran penyuluhan, maka jumlah tenaga penyuluh yang tersedia sangat terbatas. Adalah suatu tindakan yang tepat sekali untuk menempatkan siaran pedesaan pada fungsi penyuluhan. Pada hakekatnya, maksud dan tujuan penyuluhan setara dengan maksud dan tujuan dari siaran pedesaan (Marlina, 1982).

Tujuan siaran pedesaan adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kegiatannya. Dengan demikian, masyarakat desa diharapkan dapat turut

serta dengan lebih baik dalam pembangunan, demi perbaikan taraf hidup dirinya dan masyarakat lingkungannya (Direktorat Penyuluhan Pertanian Rakyat, 1975). Untuk mencapai tujuan ini, maka isi siaran pedesaan harus merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh kelompok pendengar maka hal ini dapat memadamkan aktifitas/kegiatan kelompok pendengar yang bersangkutan. Jadi, respon pendengar ditentukan oleh ada tidaknya hubungan antara isi siaran pedesaan dengan kebutuhan pendengar akan informasi (Gunardi, 1981)

Dengan mengingat pentingnya acara siaran pedesaan guna pemerataan arus informasi dan pendidikan bagi masyarakat desa, maka secara konseptual, siaran pedesaan di Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 27 September 1969. Dasar hukum yang mendasarinya adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Penerangan dan Menteri Pertanian nomor 2 tahun 1969. Dalam konsep tersebut, tercakup pengertian pengembangan dua kegiatan pokok, yaitu : pengembangan kegiatan penyiaran dan pengembangan kegiatan kelompok pendengar.

Pembentukan kelompok pendengar dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan radio sebagai media siaran pedesaan. Disamping itu, tujuan pembentukannya adalah agar interaksi diantara pendengar siaran pedesaan dapat meningkat, teratur dan berencana dalam rangka meningkatkan keefektifan belajar para pendengarnya (Direktorat Penyuluhan Pertanian Rakyat, 1975).

Sampai akhir tahun 1970-an, dalam laporan-laporan dan hasil-hasil penelitian yang diselenggarakan secara terpisah, umumnya dikemukakan bahwa kemampuan kelompok pendengar ini masih sangat bervariasi dan pembinaannya masih belum berpola dan belum mantap (Sayogyo, 1977).

Kelompok pendengar merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan bagi masyarakat di tingkat pedesaan, dengan mengorganisasikan 15 - 20 orang anggota masyarakat untuk tiap kelompok. Fungsi kelompok pendengar disesuaikan dengan prinsip siaran pedesaan, yaitu : Mendengarkan-Mendiskusikan-Bergerak (Depari, 1978; Gunardi, 1978).

Pembinaan terhadap kelompok pendengar dilakukan oleh sebuah team di tingkat kecamatan yang disebut : Team Pembina Kelompok Pendengar (TPKP). Team ini terdiri dari PPL, JUPEN dan penyuluh-penyuluh dari instansi/dinas atau lembaga diluar Dinas Pertanian. Team tersebut berada dibawah Dewan Pembina Siaran Pedesaan tingkat Kabupaten (DPSP Tingkat Kabupaten). Dengan adanya pembinaan sejak dari proses pembuatan materi siaran hingga ke sasaran, diharapkan program siaran pedesaan dapat menjadi penyalur informasi dan media belajar yang tepat bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani dan atau peternak.

Sebagai siaran pendidikan, sasaran diasumsikan sebagai murid yang menerima pelajaran. Agar supaya materi yang diberikan dapat diterima oleh sasaran tersebut, Lionberger dan Herbert (1960) berpendapat bahwa materi yang diajarkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akan dapat menguntungkan masyarakat penerima pesan
2. Berkaitan dengan teori yang dikenal sebelumnya
3. Mudah dalam pelaksanaan
4. Dapat dimengerti oleh penerima pesan
5. Dapat dilaksanakan secara bertahap

Menurut Gunardi (1979), isi siaran pedesaan yang kurang dipahami, diharapkan akan menjadi jelas dengan cara didiskusikan oleh kelompok pendengar. Hasil diskusi yang diperoleh merupakan penafsiran terhadap isi siaran pedesaan. Adanya hal seperti ini diharapkan akan menjadi umpan balik antara sumber dan penerima (Vitayala, 1974).

Kelompok pendengar sangat penting peranannya didalam sistem penyebaran informasi, baik mengenai pertanian, kesehatan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena siaran pedesaan tanpa kelompok pendengar, belum menjamin penduduk mau bersama-sama secara berkelompok, berkumpul dengan sendirinya (Suwardi, 1980). Disinilah pentingnya pembinaan kelompok pendengar untuk menunjang keefektifan program siaran pedesaan.

MATERI DAN METODA PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 10 Desember 1983 sampai dengan 10 Januari 1984. Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan kasus penelitian : Mekanisme Kerjasama dalam Pengadaan Bahan Siaran Pedesaan di RRI Stasiun Regional II Bogor.

Tempat penelitian dan pengambilan data dilaksanakan di RRI stasiun regional II Bogor, Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP) Kabupaten Bogor dan Kelompok Pendengar "Sauyunan" desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pengambilan desa Tegal Waru sebagai desa penelitian didasarkan kepada keadaan kelompok pendengarnya. Kelompok Pendengar Pria Dewasa "Sauyunan" desa Tegal Waru merupakan salah satu kelompok pendengar terbaik di wilayah Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pemilihan desa Tegal Waru didasarkan pula pada keterbatasan waktu, biaya dan tenaga dari peneliti.

Metoda Penelitian

Dalam menentukan mekanisme kerjasama ini, hal-hal yang diukur adalah : (1) frekuensi penyediaan bahan siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor, oleh instansi/dinas dan lembaga Pertanian maupun non Pertanian, PPL/JUPEN dan tokoh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; (2) frekuensi penyediaan tenaga penyiar; dan (3) frekuensi pertemuan yang dilaksanakan oleh DPSP. Pengumpulan

data diatas dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden serta penggunaan data sekunder dari RRI, DPSP dan Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Sehubungan dengan itu dipelajari pula keorganisasian DPSP dan Kelompok Pendengar.

Untuk mengetahui kesesuaian materi siaran pedesaan yang telah disiapkan, dan keterlibatan kelompok pendengar dalam penyediaan materi siaran pedesaan, digunakan periode waktu 2 (dua) tahun, yaitu Maret 1981 sampai dengan Februari 1983. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden kelompok pendengar dan tokoh-tokoh masyarakat, serta penggunaan data sekunder yang menunjang. Hal-hal yang perlu dipelajari adalah : (1) frekuensi bertemu antara kelompok pendengar dan tokoh masyarakat dengan petugas RRI, PPL/JUPEN, petugas dari instansi/dinas atau lembaga dan petugas lain diluar DPSP; (2) jenis usaha yang dilakukan; (3) masalah yang sering dihadapi dalam mengelola usahanya; (4) pendapat tentang isi siaran pedesaan dan (5) materi yang telah disiarkan.

Jenis data yang diperoleh yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif yaitu jenis data yang tidak dapat diukur dengan angka, sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dengan angka (Koentjaraningrat, 1977). Data-data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diolah secara tabulasi dan dianalisa secara kualitatif.

Data diatas digunakan untuk mempelajari mekanisme kerjasama dalam pengadaan bahan siaran pedesaan di RRI

stasiun regional II Bogor, yang meliputi parameter-parameter sebagai berikut :

1. Keikutsertaan instansi/dinas atau lembaga, RRI, PPL/JUPEN serta tokoh masyarakat dalam pengadaan bahan siaran pedesaan.
2. Keikutsertaan kelompok pendengar dalam pengadaan bahan siaran pedesaan di RRI stasiun regional II Bogor.
3. Kesesuaian materi siaran pedesaan dengan kebutuhan kelompok pendengar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor

Sejak tahun 1967, Radio Republik Indonesia (RRI) stasiun regional II Bogor telah melaksanakan semacam program siaran yang ditujukan khusus kepada masyarakat pedesaan. Hal yang hampir mirip dengan siaran pedesaan ini diberi nama "Semalam di Pedesaan". Pada mulanya siaran ini disampaikan satu kali dalam seminggu, kemudian pada tahun 1968 menjadi lebih dari satu kali seminggu. Tetapi siaran pedesaan pada waktu itu masih belum teratur.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Penerangan dan Menteri Pertanian nomor 2 tahun 1969, secara konseptual RRI stasiun regional II Bogor mulai melaksanakan siaran pedesaan, menggantikan siaran yang terdahulu. Waktu siaran juga diperbaiki menjadi setiap hari secara teratur dan dilaksanakan pada jam 19.30 sampai jam 20.00 Wib. Mulai tahun 1970, waktu siaran dipindahkan menjadi jam 17.00 sampai dengan jam 17.30 Wib., kemudian juga ditambah dengan siaran pada jam 05.30 sampai dengan jam 06.00 Wib. Tetapi kemudian jadwal siaran ini berubah lagi, yaitu menjadi hari-hari Senin, Rabu dan Jumat waktu siarannya dilaksanakan pada jam 17.00 sampai dengan 17.30 Wib.; dan hari Selasa, Kamis dan Sabtu disiarkan pada jam 05.45 sampai dengan 06.00 Wib. Dengan peningkatan jam siaran RRI menjadi 24 jam mulai 1 September 1983, siaran pedesaan di RRI stasiun regional II Bogor juga mendapat tambahan waktu siaran, yaitu pada hari Minggu jam 16.00

sampai dengan jam 16.30 Wib., dan hari Kamis menjadi dua kali siaran, dengan penambahan siaran pada jam 16.00 sampai dengan jam 16.30 Wib. Tetapi dalam penelitian ini, jadwal siaran yang dipelajari adalah sebelum tanggal 1 September 1983, yaitu mulai Maret 1981 sampai dengan Februari 1983.

Siaran pedesaan RRI stasion regional II Bogor, dipancar luaskan melalui gelombang 242.89 meter. Luas cakupan siaran pedesaan yang semula berkisar pada masalah pertanian (termasuk perikanan, perkebunan rakyat dan peternakan) mulai tahun 1970 diperluas, mencakup aspek-aspek diluar pertanian secara umum. Persentase penyiaran materi siaran pedesaan RRI stasion regional II Bogor selama periode Maret 1981 sampai dengan Februari 1983, dapat dilihat pada Lampiran 1.

Persentase rata-rata materi yang disiarkan dalam periode waktu Maret 1981 sampai dengan Februari 1983, berdasarkan klasifikasi masalah, adalah sebagai berikut :

1. Masalah pertanian dan sektor-sektor yang mendukung pertanian 63.46%
2. Masalah kesehatan, KB dan Kependudukan 20.23%, dan
3. Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan dan Pengetahuan lainnya 16.31%.

Persentase masalah ini secara lengkap, disajikan dalam Tabel 1.

Siaran pedesaan RRI stasion regional II Bogor diasuh oleh suatu badan yang disebut Badan Pembina Siaran Pedesaan (BPSP). Dalam penyelenggaraan siaran, diadakan

suatu pola siaran yang merupakan program siaran selama satu minggu. Vitayala (1974) mengemukakan bahwa pada prinsipnya, pola siaran ini ditangani serta merupakan kerjasama antara instansi/dinas dan lembaga yang tergabung dalam DPSP. Tetapi kenyataannya, tidak semua instansi/dinas atau lembaga menunjukkan kerjasama yang diinginkan. Akibatnya, seringkali pada saat siaran akan dilaksanakan, naskah tidak ada. Dengan keadaan seperti ini, pola siaran yang telah digariskan tidak dapat diikuti. Masalah lain yang dihadapi oleh pihak penyelenggara siaran pedesaan adalah keterbatasan tenaga, waktu dan biaya operasional.

Tabel 1. Persentase materi yang disiarkan berdasarkan klasifikasi masalah periode Maret 1981 - Februari 1983

M a s a l a h	Persentase		Rat a-rata
	1981/1982	1982/1983	
Masalah pertanian dan yang mendukung pertanian	64.31	62.61	63.46
Masalah Kesehatan, KB dan Kependudukan	20.78	19.68	20.23
Masalah Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengetahuan lainnya	14.91	17.71	16.31
T o t a l	100.00	100.00	100.00

Vitayala (1974) lebih lanjut mengemukakan bahwa hal-hal seperti diatas dapat diatasi jika : (1) siaran pedesaan diasuh oleh orang yang khusus mengenai hal yang

pedesaan diasuh oleh orang yang khusus mengenai hal yang bersangkutan; (2) siaran pedesaan mempunyai fasilitas sendiri, seperti mesin tik, kaset dan pita rekaman; dan (3) biaya tersendiri untuk penyelenggaraan siaran pedesaan.

Sampai dengan saat penelitian ini dilaksanakan, belum ada tenaga khusus dari luar RRI yang mengasuh siaran pedesaan di RRI stasiun regional II Bogor, sehingga apabila ada masalah-masalah khusus yang menyangkut teknik pelaksanaan suatu materi diluar bidang petugas RRI tersebut, akan berpengaruh terhadap cara penyampaian, penghayatan dan penerimaan materi tersebut oleh petugas RRI dan sasaran atau penerima materi.

Dari hasil wawancara dengan pengurus harian DPSP Kabupaten Bogor, diperoleh keterangan bahwa dana operasional DPSP dan siaran pedesaan sudah diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Tetapi realisasinya sampai sekarang belum terlaksana. Selama ini dana operasional belum merupakan dana tetap. Jadi masih berupa dana insidental yang diterima dari Pemerintah maupun instansi/dinas atau lembaga dalam bentuk prasarana dan sarana siaran pedesaan.

Keorganisasian siaran pedesaan terdiri dari Dewan Pembina Siaran Pedesaan (DPSP) sebagai "policy maker", dan Badan Pelaksana Harian DPSP (BP-Harian DPSP) yang berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan administrasi dan operasional DPSP. Untuk tingkat Kecamatan, terdapat pula Team Pembina Kelompok Pendengar (TPKP). Jabatan TPKP, dipegang oleh para petugas dari Dinas Pertanian, JUPEN dan urusan

Tata kerja DPSP Kabupaten DT.II Bogor adalah paralel dengan BP-Harian DPSP dan TPKP, dalam pengertian bahwa apa bila wakil ketua I pada DPSP dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian, maka wakil ketua I pada BP-Harian DPSP dijabat oleh Kepala Seksi Penyuluhan, Dinas Pertanian. Menurut laporan perkembangan siaran pedesaan DT. II Bogor tahun 1981 dan 1982 (DPSP Kab. DT. II Bogor, 1983), manfaat sistem kerja seperti ini adalah memudahkan cara tugas dan perintah dari atasan langsung dalam instansi kepada bawahannya. Untuk sistem kerja seperti ini, dituntut keaktifan/perhatian penuh dari atasan dalam instansi yang bersangkutan, terhadap perkembangan siaran pedesaan.

Selanjutnya dilaporkan pula oleh DPSP Kabupaten DT.II Bogor, bahwa cara penyelenggaraan acara siaran pedesaan melalui RRI yaitu dengan sistem pembagian tugas dan penanggung jawab harian (Lampiran 3). Dalam penyelenggaraan siaran pedesaan tersebut, semua instansi/dinas dan lembaga yang menjadi anggota BP-Harian DPSP, dibagi habis untuk enam hari kerja dalam satu minggu (Senin sampai dengan Sabtu). Untuk setiap harinya, ada satu instansi/dinas atau lembaga yang menjadi penanggung jawab siaran pada hari yang bersangkutan.

Pertanggung-jawaban pelaksanaan siaran pedesaan dari BP-Harian DPSP adalah kepada Ketua DPSP dan Bupati, sedangkan DPSP bertanggung jawab kepada Bupati dan Ketua DPSP Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Pertanggung-jawaban ini adalah dalam bentuk laporan tahunan.

Pembinaan anggota BP-Harian DPSP dilakukan melalui rapat-rapat dan kerjasama program instansional. Secara konsepsionan, BP-Harian DPSP mengadakan rapat-rapat setiap triwulan sekali. Dalam pelaksanaannya, pada periode Maret 1981 sampai dengan Februari 1983, rapat-rapat yang terlaksana adalah sebanyak lima kali (62.50%), sedangkan pertemuan rutin yang semestinya harus terlaksana adalah sebanyak delapan kali (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah pertemuan/rapat BP-Harian DPSP Kabupaten DT II Bogor periode Maret 1981 sampai dengan Februari 1983

Tahun	Jumlah pertemuan
1 9 8 1	3 (tiga) kali
1 9 8 2	1 (satu) kali
1 9 8 3	1 (satu) kali
Jumlah pertemuan	5 (lima) kali

Sumber : Absensi Pertemuan/Rapat BP-Harian DPSP tahun 1981 - 1983; DPSP Kabupaten DT II Bogor, 1983.

Keikutsertaan Instansi/Dinas, RRI, PPL/JUPEN dan Tokoh Masyarakat dalam Pengadaan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor

Pelaksanaan program siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang dengan pengadaan bahan siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/kelompok pendengar. Dalam hal ini, keikutsertaan instansi/dinas atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah akan sangat membantu, terutama bagi RRI

sebagai penyelenggara siaran pedesaan. Keikutsertaan instansi/dinas atau lembaga dalam pelaksanaan program siaran pedesaan adalah dalam bentuk (1) penyediaan bahan siaran dan (2) penyediaan tenaga penyiar.

Keikutsertaan instansi/dinas atau lembaga dalam pengadaan bahan siaran pedesaan, dalam periode waktu dua tahun (Maret 1981 - Februari 1983), dapat dilihat pada frekuensi penyediaan naskah siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor (Tabel 3).

Dari Tabel 3 tersebut terlihat bahwa sumber penyediaan naskah siaran terbesar adalah dari Brosur/Majalah atau buku-buku yang diusahakan sendiri oleh RRI sebagai penanggung jawab pelaksanaan siaran pedesaan. Frekuensi dalam tahun 1981/1982 adalah sebanyak 67 kali (26.27%), sedangkan dalam bentuk naskah, RRI merupakan penyedia terbanyak, yaitu 73 kali (28.63%). Hal ini disebabkan karena RRI bertanggung jawab atas tersenggaranya siaran pedesaan setiap harinya, sedangkan naskah yang masuk dari instansi/dinas atau lembaga yang lain, masih kurang. Untuk itu, RRI harus menyediakan sendiri naskah-naskah yang akan disiarkan. Naskah-naskah ini didapat dari hasil peninjauan atau anjngsana ke lokasi kelompok pendengar, berdasarkan pengalaman penyiar ataupun sari surat-surat yang masuk dari kelompok pendengar yang ditujukan kepada RRI.

Tabel 3. Frekuensi Penyediaan Naskah Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor Menurut Sumber Periode Maret 1981 - Februari 1983

Sumber	Frekuensi		Persen	
	'81/'82	'82/'83	'81/'82	'82/'83
Instansi/Dinas atau Lembaga Pertanian	46	51	18.04	16.72
Instansi/Dinas atau Lembaga non Pertanian	48	50	18.82	16.39
RRI	73	51	28.63	16.72
Brosur/Majalah	67	122	26.27	40.00
Kliping	13	6	5.10	1.97
Paket	-	7	-	2.20
Dan lain-lain	8	18	3.14	5.90
T o t a l	255 ¹⁾	305	100.00	100.00

Sumber : diolah dari data naskah siaran pedesaan RRI regional II Bogor, 1983.

1) Data bulan Juli 1981 tidak dapat diperoleh karena penanggung jawab siaran pedesaan sedang mengikuti penataran, sedangkan dari instansi/dinas atau lembaga tidak ada catatan atau data tersebut.

Sumber lain yang dimaksud adalah berupa laporan-laporan kelompok pendengar, PPL dan surat-surat yang masuk ke RRI dari kelompok pendengar.

Dalam tahun 1982/1983, sumber naskah yang terbesar adalah dari Brosur/Majalah yaitu 122 kali (40.00%), mengalami kenaikan persentase sebesar 13.73% dari tahun sebelumnya. Naskah dari RRI dan dinas/instansi atau lembaga pertanian masing-masing adalah 51 kali (16.72%), atau

mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 11.97% dan 1.87% dari tahun sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan pihak RRI dan DPSP, diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan persentase sumber naskah dari Brosur/Majalah disebabkan karena instansi/dinas atau lembaga lebih banyak mengirimkan/menyumbangkan brosur-brosur/majalah ke RRI dibandingkan dengan naskah yang sudah jadi. Dengan sendirinya, hal ini pulalah yang menyebabkan penurunan persentase naskah yang masuk dari instansi/dinas atau lembaga. Dengan adanya brosur/majalah dari instansi/dinas atau lembaga, tanggung jawab RRI dalam penyediaan bahan/naskah siaran dapat tertanggulangi. Tetapi walaupun demikian, RRI masih harus memperbaiki naskah-naskah dari brosur/majalah tersebut, sehingga menjadi bentuk yang sesuai untuk disiarkan melalui radio dan dapat diterima/dimengerti oleh masyarakat pendengarnya/kelompok pendengar.

Bantuan lain yang diterima RRI adalah dalam bentuk paket siaran dari RRI pusat. Paket siaran ini berisi materi tentang : Kesehatan 2 kali; Peternakan 2 kali; Perikanan, Koperasi dan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) masing-masing satu kali. Paket siaran ini sudah berupa rekaman.

Dari instansi/dinas atau lembaga pertanian, frekuensi penyediaan bahan siaran pedesaan oleh masing-masing instansi/dinas atau lembaga, dapat dilihat pada Tabel 4.

Sejumlah 50% bahan siaran pedesaan dari instansi/dinas atau lembaga Pertanian pada tahun 1981/1982 disediakan oleh IPB (Institut Pertanian Bogor) dan LPPM (Lembaga

Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat), yaitu 23 kali dari 46 kali siaran. Pada tahun 1982/1983 (bahan siaran pedesaan yang disediakan) adalah 33.33%, yaitu 17 kali dari 51 kali siaran. IPB dan LPPM sudah melaksanakan secara rutin pengisian siaran pedesaan di RRI stasion regional II Bogor, yaitu satu kali seminggu. Keteraturan ini dimungkinkan karena setiap fakultas yang ada di IPB, dengan kesadaran sendiri telah dengan teratur pula ikut mengisi acara siaran pedesaan di RRI stasion regional II Bogor, atas nama IPB/LPPM.

Tabel 4. Frekuensi Penyediaan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasion Regional II Bogor Oleh Instansi/Dinas atau Lembaga Pertanian

Instansi/Dinas atau Lembaga	Mutlak		Persen	
	'81/'82	'82/'83	'81/'82	'82/'83
Pertanian	7	2	15.22	3.92
Perkebunan	6	11	13.04	21.57
Perhutani	2	1	4.35	1.96
Perikanan	1	7	2.17	13.73
Peternakan	4	7	8.70	13.73
IPB/LPPM	23	17	50.00	33.33
B I P	1	3	2.17	5.88
L B N	2	3	4.35	5.88
T o t a l	46	51	100.00	100.00

Sumber : diolah dari data Naskah Siaran Pedesaan RRI Stasion Regional II Bogor, 1983

Instansi/dinas dan lembaga lain, walaupun sudah diadakan jadwal tetap untuk melaksanakan/mengisi acara siaran pedesaan, tetapi mereka belum melaksanakannya secara rutin. Dari wawancara dengan Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan serta keterangan dari pengurus harian DPSP, kekurangan-aktifan instansi/dinas atau lembaga tersebut adalah karena keterbatasan tenaga, dana dan keahlian dalam hal penyiaran dan penulisan naskah yang siap untuk disajikan dalam bentuk siaran radio.

Instansi/dinas dan lembaga lain yang menonjol dalam penyediaan naskah pertanian 1981/1982 adalah Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, yaitu 15.22% dan 13.04% dari 46 kali siaran. Pada tahun 1982/1983 Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan lebih menonjol dalam penyediaan naskah pertanian, dibanding dengan instansi/dinas atau lembaga yang lain, yaitu 21.51% dari Dinas Perkebunan dan masing-masing 13.73% dari Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan. Jumlah siaran pertanian dalam tahun 1982/1983 adalah 51 kali siaran. Keaktifan instansi/dinas atau lembaga dalam penyediaan naskah siaran, diduga berkaitan erat dengan peranan instansi/dinas dan lembaga yang bersangkutan dalam DPSP, serta keaktifan para petugas instansi/dinas dan lembaga dalam mengisi acara siaran pedesaan.

Dalam kepengurusan DPSP Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bogor menjabat sebagai wakil

ketua I DPSP Kabupaten Bogor. Disamping itu, petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor juga menjabat sebagai wakil ketua I dan bendahara dalam kepengurusan BP-Harian DPSP Kabupaten Bogor. Sedangkan semua instansi/dinas dan lembaga lain dalam wilayah Kabupaten Bogor, berstatus sebagai anggota BP-Harian DPSP Kabupaten Bogor.

Untuk menghasilkan bahan siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat pendengar, diperlukan suatu keahlian dalam hal penyediaan naskah siaran dan cara penyajiannya. Keikutsertaan instansi/dinas atau lembaga dalam penyediaan tenaga penyiar siaran pedesaan RRI stasion regional II Bogor, dapat dilihat pada Tabel 5.

Secara ideal, penyiaran siaran pedesaan melalui RRI dilakukan oleh instansi/dinas atau lembaga yang bersangkutan. Hal ini untuk menjamin ketepatan dalam penyampaian, pengertian dan penghayatan materi tersebut. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 1981/1982, 85.50% dari jumlah siaran 255 kali, tenaga penyiarnya berasal dari RRI. Kemudian pada periode tahun 1982/1983, dari 305 kali siaran, 89.50% tenaga penyiarnya juga berasal dari RRI. Instansi/dinas dan lembaga lain yang sedikit menonjol dalam penyediaan tenaga penyiar adalah IPB/LPPM dan Dinas Kesehatan. Dari keadaan ini terlihat sekali keterbatasan instansi/dinas atau lembaga dalam penyediaan tenaga penyiar. Keadaan ini disebabkan karena waktu dan tenaga yang mempunyai keahlian dalam hal penyajian materi melalui siaran radio.

Tabel 5. Jumlah Tenaga Penyiar Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor Menurut Sumber Periode Maret 1981 - Februari 1983

Sumber	Mutlak		Persen	
	'81/'82	'82/'83	'81/'82	'82/'83
R R I	218	273	85.50	89.50
IPB/LPPM	17	16	6.67	5.24
Dinas Pertanian	1	-	0.39	-
Dinas Perkebunan	1	2	0.39	0.66
Dinas Perikanan	-	1	-	0.33
Dinas Peternakan	1	2	0.39	0.66
Perum Perhutani	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	14	6	5.49	1.97
Dinas Koperasi	1	-	0.39	-
Transmigrasi	1	-	0.39	-
L B N	-	1	-	0.33
DEPPEN	-	2	-	0.66
B R I	1	-	0.39	-
D P S P	-	2	-	0.66
T o t a l	255	305	100.00	100.00

Sumber : diolah dari data Naskah Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, 1983.

PPL/JUPEN dan tokoh masyarakat juga berperan dalam proses penyediaan bahan siaran pedesaan. Dari hasil wawancara dengan DPSP diperoleh keterangan bahwa tenaga PPL hanya terdapat pada Dinas Pertanian, sedangkan instansi/dinas atau lembaga lainnya hanya mempunyai Kepala Cabang Dinas (KCD) dan juru penerang (JUPEN) di tingkat Kecamatan.

Demikian pula halnya dengan dinas Peternakan. Dinas Peternakan Kabupaten Bogor hanya mempunyai PPL untuk tingkat Kabupaten, sedangkan di tingkat Kecamatan peranan PPL dirangkap oleh kepala-kepala cabang dinas.

Peranan PPL/JUPEN dan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah dalam hal penyajian laporan-laporan perkembangan kelompok pendengar dan informasi tentang potensi desa dan potensi kelompok pendengar. Hasil dari laporan dan informasi ini, oleh RRI disajikan kembali dalam bentuk siaran radio kepada masyarakat umumnya dan kelompok pendengar.

Keikutsertaan Kelompok Pendengar dalam
Pengadaan Bahan Siaran Pedesaan RRI
Stasiun Regional II Bogor

Dari hasil wawancara dengan BP-Harian DPSP Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, diperoleh keterangan bahwa bahan siaran pedesaan juga diperoleh dari hasil umpan balik kelompok pendengar. Umpan balik tersebut berupa respon/tanggapan terhadap materi siaran yang disiarkan. Respon/tanggapan terhadap siaran pedesaan ini terlihat dari adanya surat-surat yang masuk ke bagian penanggung-jawab siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor, dan dari kehadiran kelompok pendengar dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh BP-Harian DPSP. Dalam lima kali pertemuan yang diadakan, sebagian besar kelompok pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, menghadiri seluruh pertemuan yang diadakan tersebut (Tabel 6).

Tabel 6. Frekuensi Kehadiran dalam Lima Kali Pertemuan BP-Harian DPSP Maret 1981 - Februari 1983

Peserta Pertemuan	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran dalam Lima Kali Pertemuan
Dinas Pertanian	5	100
Dinas Perkebunan	3	60
Dinas Perikanan	4	80
Dinas Peternakan	3	60
Perum Perhutani	2	40
R R I	4	80
P P L	2	40
Kelompok Pendengar di wilayah Kab. Bogor	5	100

Sumber : Absensi Pertemuan/Rapat BP-Harian DPSP Kabupaten Bogor Maret 1981 - Februari 1983.

Disamping itu, berdasarkan Daftar Pertanyaan dari DPSP Propinsi DT I Jawa Barat untuk ketua/pengurus DPSP Kabupaten DT II Bogor tahun 1982, serta dari hasil pengamatan ketua kelompok dan tokoh masyarakat (Kepala Desa), frekuensi keaktifan kelompok pendengar dalam pertemuan kelompok akan tampak hidup apabila dihadiri atau dibimbing oleh para pembina tingkat Kecamatan, minimal para pembina desa setempat, termasuk PPL. Selanjutnya berdasarkan keterangan pengurus BP-Harian DPSP dan petugas RRI, Kepala Desa Tegalwaru serta ketua kelompok pendengar "Sauyunan", hal-hal yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi kelompok diajukan kepada pembina setempat atau kepada penyelenggara siaran tersebut oleh kelompok pendengar adalah dalam

bentuk pengiriman surat atau bertanya langsung kepada pem bina setempat. Oleh penyelenggara siaran, surat-surat yang masuk ini kemudian menjadi masukan untuk bahan siaran pedesaan. Dalam menjawab surat-surat dari kelompok pendengar ini, RRI sebagai penyelenggara siaran bekerja sama dengan instansi/dinas dan lembaga yang berwenang dalam menjawab surat-surat tersebut.

Kesesuaian Materi Siaran Pedesaan dengan
Kebutuhan Kelompok Pendengar

Seperti telah dikemukakan, bahwa materi siaran yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan (felt need) sasaran (kelompok pendengar). Disamping itu disesuaikan pula dengan kegiatan yang ada dan potensi desa sasaran.

Dalam wilayah DPSP Kabupaten DT II Bogor, dalam tahun 1983 terdapat tidak kurang dari 152 kelompok pendengar. Perincian jumlah perkembangan kelompok pendengar tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, Tahun 1981 - 1983

Kategori	Jumlah Kelompok Pendengar		
	1981	1982	1983
Pria Dewasa	75	131	125
Wanita	5	12	18
Pemuda	3	5	9
T o t a l	83	148	152

Sumber : DPSP Kabupaten DT II Bogor, 1983.

Angka-angka pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kelompok pendengar dari tahun 1981 - 1983. Akan tetapi untuk kategori kelompok pendengar pria dewasa, terjadi penurunan/pengurangan jumlah kelompok pendengar pada tahun 1983 dibandingkan tahun 1982 dan 1981. Tidak ada data yang dapat menjelaskan keadaan ini. Diduga hal ini dapat disebabkan karena ketidak-aktifan dari ketua kelompok setempat atau faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti (1) kesesuaian materi siaran dengan kebutuhan kelompok, (2) hubungan kelompok dengan sumber siaran pedesaan, (3) unsur kepemimpinan dalam kelompok pendengar, (4) dinamika kelompok, dan (5) pengelolaan terhadap program (Maryanie, 1982).

Materi siaran pedesaan juga harus disesuaikan dengan kegiatan kelompok pendengar yang ada. Berdasarkan data kelompok pendengar siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor tahun 1981, kegiatan kelompok pendengar di wilayah Kabupaten DT II Bogor, dapat dilihat pada Tabel 8.

Bila jenis kegiatan dikelompokkan sebagai satu kesatuan kegiatan, maka persentase kegiatan kelompok pendengar siaran pedesaan berdasarkan jenis kegiatannya, dapat dilihat pada Tabel 9.

Dari Tabel 9 tersebut, terlihat bahwa kegiatan pertanian merupakan jenis kegiatan terbesar yang dilakukan oleh kelompok pendengar. Selain kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan pilihan lainnya yang dilakukan oleh kelompok pendengar, masing-masing yaitu :
Peternakan 21.30% dan Perikanan 18.52%.

Tabel 8. Jumlah Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, berdasarkan Macam Kegiatan tahun 1981

Macam Kegiatan	Mutlak	Persen
Pertanian	33	39.76
Pertanian dan Simpan Pinjam	7	8.43
Pertanian dan Perikanan	3	3.61
Pertanian dan Peternakan	6	7.23
Perikanan dan Peternakan	16	19.28
Perikanan	1	1.21
Peternakan	1	1.21
P K K	4	4.82
Lain-lain	12	14.45
T o t a l	83	100.00

Sumber : Data Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, 1981.

Tabel 9. Jumlah Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, berdasarkan Jenis Kegiatannya Tahun 1981

Jenis Kegiatan	Jumlah	Persen
P e r t a n i a n	49	45.37
P e t e r n a k a n	23	21.30
P e r i k a n a n	20	18.52
P K K	4	3.70
Lain-lain	12	11.11
T o t a l	108	100.00

Sumber : Data Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor Tahun 1981.

Seperti telah dikemukakan terdahulu, maka materi siaran pedesaan yang telah disiarkan oleh RRI, selaras dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pendengar dalam wilayahnya.

Untuk tahun 1982 dan 1983 tidak ada data tentang jenis kegiatan kelompok pendengar, tetapi seperti telah dijelaskan dimuka, materi siaran terbesar yang disiarkan masih berkisar pada masalah pertanian dan yang mendukung pertanian. Diduga jenis kegiatan kelompok pendengar juga tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1981.

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pendengar, tidak berbeda jauh dengan potensi desa setempat. Sebagai contoh adalah desa Tegalwaru yang berpotensi pada bidang pertanian. Luas desa Tegalwaru 340 843 hektar; 247 027 hektar digunakan untuk persawahan. Dari jumlah penduduk 5 886 jiwa (termasuk anak-anak dan orang tua), 440 orang adalah petani pemilik sawah dan 107 orang adalah petani petani penggarap. Kegiatan/mata pencaharian penduduk lainnya yang terbesar adalah buruh 684 orang, pedagang 827 orang dan industri rumah tangga 527 orang¹⁾!

Kelompok pendengar yang ada di desa Tegalwaru adalah kelompok pendengar kategori pria dewasa. Kegiatan kelompok ini sesuai dengan potensi desa yang ada, yaitu dalam bidang pertanian dan kemudian diarahkan kepada kegiatan perkoperasian/simpan pinjam.

1) Data diperoleh dari daftar potensi desa Tegalwaru, 1983

Pengarahan dan pembinaan yang intensif dari kepala desa, aparat pembina dari Kecamatan dan PPL serta JUPEN berpengaruh besar terhadap perkembangan kelompok pendengar ini. Sekalipun sebagian besar anggotanya buta huruf, Kelompok Pendengar "Sauyunan" desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea telah berhasil keluar sebagai juara III kompetisi siaran pedesaan tingkat Kabupaten tahun 1980/1981 dan juara Harapan I kompetisi siaran pedesaan tingkat Propinsi tahun 1981/1982 (DPSP Kabupaten DT II Bogor, 1983).

Mekanisme Penyusunan Bahan Siaran Pedesaan
RRI Stasiun Regional II Bogor

Penyusunan bahan siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor, dilakukan dengan kerjasama antara instansi/dinas dan lembaga, RRI, PPL/JUPEN, tokoh masyarakat serta kelompok pendengar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Bogor nomor TL 002/183/Kpts/Huk/1980, DPSP Kabupaten Bogor yang telah dibentuk, bertugas antara lain untuk (1) mengadakan penelitian dan pengembangan siaran pedesaan, (2) membimbing dan memberikan motivasi kepada para pendengar acara siaran pedesaan, (3) mengadakan pembinaan wilayah dan (4) membina kelompok pendengar siaran pedesaan.

Berdasarkan potensi wilayah, instansi/dinas dan lembaga mengirimkan naskah-naskah siaran pedesaan dalam bidangnya masing-masing kepada RRI stasiun regional II Bogor. Naskah-naskah siaran ini ada yang sudah berupa

naskah jadi, tetapi kadangkala masih berupa naskah mentah. Oleh RRI, naskah mentah ini diolah sedemikian rupa sehingga dapat disiarkan dalam bentuk siaran radio yang mudah dipahami maksudnya oleh masyarakat desa/kelompok pendengar.

Materi siaran yang didengar oleh kelompok pendengar, kemudian didiskusikan bersama oleh anggota kelompok pendengar. Hasil diskusi kelompok pendengar ini, bila tidak mengalami kesulitan, diterapkan langsung oleh anggota kelompok pendengar. Artinya, materi siaran yang disampaikan melalui radio dapat dimengerti dan diartikan dengan benar oleh kelompok pendengar, serta dapat mereka laksanakan. Tetapi bila diskusi tersebut mengalami kesulitan, artinya ada hal-hal yang tidak dimengerti dan masih asing bagi mereka, diajukan kembali pada pertemuan rutin dengan PPL/JUPEN. Oleh PPL/JUPEN, hal-hal yang dapat dipahami oleh PPL/JUPEN segera diberikan penjelasannya pada saat pertemuan itu juga. Tetapi bila ada hal-hal yang tidak dapat dipecahkan oleh PPL/JUPEN, hal tersebut disampaikan ke tingkat Kecamatan atau Kabupaten untuk didiskusikan kembali dengan kepala-kepala cabang dinas di Kecamatan atau instansi/dinas dan lembaga di tingkat Kabupaten. Kelompok pendengar sering pula secara langsung mengirimkan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha mereka dalam bentuk surat kepada RRI sebagai penyelenggara siaran.

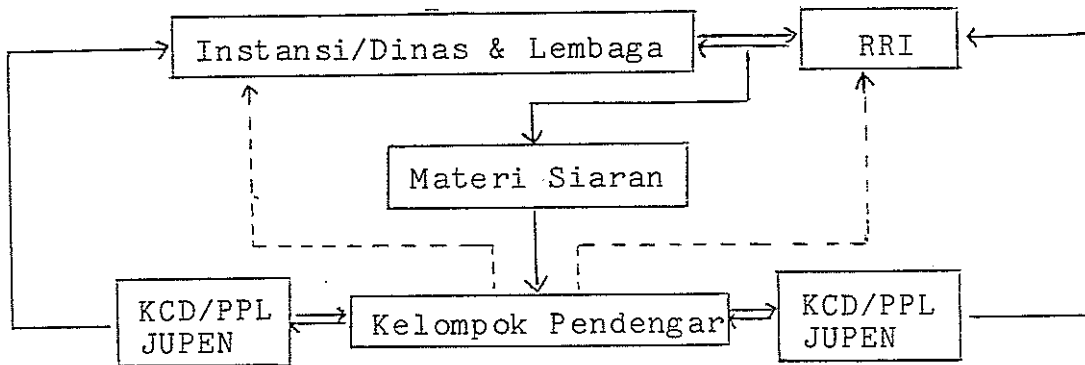
Hasil laporan PPL/JUPEN atau Kepala Cabang Dinas, oleh instansi/dinas atau lembaga serta RRI, kemudian

dijadikan sebagai bahan siaran dan disarikan dalam bentuk naskah siaran sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Untuk penyusunan bahan siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sering pula pihak RRI maupun instansi/dinas atau lembaga secara langsung mengunjungi sasaran/kelempok pendengar. RRI mengunjungi sasaran untuk meninjau hasil siaran dan kemudian menyiarkan kembali melalui acara siaran pedesaan. Kegiatan seperti ini bermanfaat dalam hal memberikan motivasi kegiatan bagi kelompok-kelompok pendengar yang baru terbentuk.

Dari hasil peninjauan ke desa Tegalwaru dan kelompok pendengar "Sauyunan" desa Tegalwaru, keberhasilan kegiatan kelompok ini berkaitan dengan keaktifan kelompok dalam mengadakan pertemuan-pertemuan. Pertemuan kelompok diadakan satu kali seminggu, yaitu pada hari Jumat. Acara pertemuan adalah mendiskusikan materi siaran dan keadaan usaha pertanian anggota. Disamping itu kelompok pendengar juga melakukan pertemuan rutin dengan PPL satu kali seminggu. Pada pertemuan dengan PPL, dibahas hal-hal yang tidak dimengerti oleh kelompok pendengar dan kalau memungkinkan, kelompok pendengar langsung mempraktekkan materi yang diterima tersebut, dengan bantuan dan pengawasan dari PPL. Bila materi tersebut tidak dapat langsung dipraktekkan, karena keterbatasan pengetahuan PPL, maka PPL atau kelompok pendengar "Sauyunan", mengundang instansi/dinas atau lembaga yang berwenang dengan sepengetahuan kepala desa.

Mekanisme penyusunan bahan siaran pedesaan RRI stasiun regional II Bogor, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Penyusunan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor

Bila dilihat dari hasil penelitian di muka, maka sebagian besar materi siaran yang dihasilkan, telah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat/kelompok pendengar di wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini dapat dilihat dari persentase materi siaran yang disiarkan oleh RRI Bogor, dan dibandingkan pula dengan persentase kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar kelompok pendengar di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil ini dapat diperoleh karena adanya keikutsertaan instansi/dinas dan lembaga serta kelompok pendengar, dalam rangka menghasilkan suatu materi siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Potensi dan Hambatan-hambatan pada mekanisme Kerjasama dalam Pengadaan Bahan Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor

Pada proses/mechanisme kerjasama dalam pengadaan bahan siaran pedesaan RRI Stasiun Regional II Bogor, terdapat

potensi-potensi disamping hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran mekanisme tersebut.

Potensi yang terlihat pada proses/mekanisme kerjasama tersebut adalah dari struktur organisasi DPSP. Tata kerja yang paralel antara DPSP sebagai "policy maker" dengan BP-Harian DPSP sebagai pelaksana hariannya, memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang efektif. Artinya, antara kepala-kepala instansi/dinas dan lembaga anggota pengurus DPSP dan bawahannya yang duduk pada kepengurusan BP-Harian DPSP, terdapat pengertian yang sama dalam menerima dan memberi instruksi-instruksi serta laporan-laporan. Tetapi pada proses seperti ini dituntut keaktifan dan perhatian khusus dari kepala-kepala dinas/instansi atau lembaga dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk pengadaan bahan siaran pedesaan. Misalnya dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional khusus dalam kepengurusan BP-Harian DPSP dan tenaga-tenaga profesional khusus sebagai tenaga lapangan.

Tenaga lapangan ini berguna sekali dalam hal : (1) penentuan situasi yang diinginkan, (2) penentuan situasi yang ada pada saat itu, (3) identifikasi kesenjangan yang ada antara situasi yang ada dan situasi yang diinginkan, serta (4) penilaian terhadap kesenjangan yang ada tersebut. Keempat faktor diatas adalah proses perencanaan program menurut Pesson (1966). Proses pengadaan bahan siaran pedesaan, juga merupakan salah satu proses perencanaan program dalam bidang penyuluhan.

Potensi lain dalam mekanisme kerjasama ini adalah keterlibatan semua instansi/dinas dan lembaga dalam kepengurusan BP-Harian DPSP. Dengan keterlibatan ini, maka pihak penyelenggara siaran (RRI) dapat berkomunikasi langsung dengan pihak instansi/dinas atau lembaga sebagai sumber materi siaran pedesaan. Hubungan ini berlangsung sebagai hubungan antara sesama pengurus, yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya siaran pedesaan, bukan sebagai hubungan lintas sektoral atau antar instansi/dinas atau lembaga. Disamping itu faktor kesediaan dari instansi/dinas atau lembaga untuk mengadakan kerjasama dengan pihak RRI, merupakan potensi yang besar untuk terselenggaranya siaran pedesaan.

Keaktifan kelompok pendengar dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengadakan hubungan dengan pihak penyelenggara siaran, juga merupakan potensi dalam mekanisme kerjasama ini.

Adanya surat-surat dari kelompok pendengar yang ditujukan kepada penyelenggara siaran, merupakan sumber bahan untuk siaran pedesaan. Dengan adanya surat-surat tersebut, pihak penyelenggara dapat mengetahui keinginan maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh sasaran. Bila hal ini sudah diketahui oleh penyelenggara, maka materi yang akan disiarkan dapat disesuaikan dengan keinginan dan masalah yang dihadapi oleh sasaran/kelompok pendengar.

Hambatan-hambatan yang ada pada mekanisme kerjasama ini adalah tidak tersedianya tenaga-tenaga profesional

khusus yang menangani siaran pedesaan dari instansi/dinas dan lembaga, kecuali dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Sebagian besar instansi/dinas atau lembaga pertanian maupun non pertanian, merupakan anggota dari BP-Harian DPSP. Tenaga-tenaga dari instansi/dinas atau lembaga ini, selain sebagai karyawan dari instansi/dinas atau lembaga yang bersangkutan, juga harus bertanggung jawab pada tugasnya dalam kepengurusan DPSP atau BP-Harian DPSP. Akibatnya terjadi rangkap jabatan pada diri karyawan dari instansi/dinas atau lembaga tersebut. Rangkap jabatan ini umumnya berpengaruh negatif terhadap mekanisme penyediaan/pengadaan bahan siaran pedesaan. Artinya, karyawan instansi/dinas atau lembaga yang bersangkutan lebih mengutamakan tugasnya sebagai karyawan dari instansi/dinas atau lembaganya, dibanding dengan tugasnya didalam kepengurusan BP-Harian DPSP maupun DPSP. Tetapi, rangkap jabatan ini sebenarnya dapat dijadikan potensi untuk memperbaiki komunikasi antara sesama pengurus dalam DPSP maupun BP-Harian DPSP.

Hambatan lain adalah dalam hal pembiayaan atau penyediaan dana untuk penyelenggaraan siaran pedesaan. Selama ini, dana yang diperoleh berasal dari dana bantuan pemerintah atau usaha sendiri dari DPSP. Tetapi dana itu bersifat insidental, yang belum tentu tersedia pada saat diperlukan oleh DPSP. Walaupun masalah dana ini sudah diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi belum ada realisasinya sampai saat ini.

KESIMPULAN

1. Dalam pengadaan bahan siaran pedesaan, RRI melakukan kerjasama dengan instansi/dinas dan lembaga lain dalam bentuk penyediaan bahan siaran dan tenaga penyiar siaran pedesaan.
2. Penyediaan bahan siaran dari instansi/dinas atau lembaga adalah dalam bentuk "draft" naskah atau naskah yang sudah jadi. Bila masih merupakan "draft" naskah atau brosur, maka pihak RRI akan menyempurnakan bahan tersebut menjadi naskah yang siap untuk diudarkan melalui RRI.
3. PPL/JUPEN dan tokoh-tokoh masyarakat, berperan dalam hal penyediaan laporan-laporan lapangan atau keadaan kelompok pendengar kepada DPSP atau RRI. Dari hasil laporan ini, materi siaran yang akan disiarkan oleh RRI, akan disesuaikan dengan kegiatan tersebut.
4. Kelompok pendengar berperan dalam proses penyesuaian materi siaran dengan kebutuhan kelompok, yaitu dengan adanya umpan balik dari kelompok pendengar yang berupa surat-surat yang ditujukan kepada penyelenggara siaran pedesaan. Surat-surat ini merupakan sumber naskah siaran pedesaan.
5. Frekuensi pertemuan yang dijadwalkan per triwulan, tidak dapat dipenuhi seluruhnya. Hal ini diduga karena kesibukan masing-masing pengurus dalam instansi/dinas atau lembaganya masing-masing.
6. Materi siaran yang disiarkan oleh RRI dalam siaran pedesaan sudah sesuai dengan keadaan/kebutuhan kelompok

pendengar. Sebagian besar kegiatan kelompok pendengar di Kabupaten Bogor adalah dalam bidang pertanian, kemudian peternakan dan perikanan. Materi siaran yang disiarkan oleh RRI sebagian besar juga terdiri dari masalah pertanian, kemudian peternakan dan perikanan. Di sektor non pertanian, masalah yang cukup besar mendapat perhatian untuk disiarkan adalah tentang Kesehatan/KB dan Transmigrasi.

7. Ada beberapa faktor yang merupakan hambatan dalam mekanisme kerjasama ini yang terlihat, yaitu masih kurang meratanya partisipasi instansi/dinas atau lembaga dalam pengadaan bahan siaran pedesaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya penyediaan dana yang merupakan dana tetap untuk penyelenggaraan siaran pedesaan. Adanya jabatan rangkap pada diri anggota pengurus DPSP juga merupakan hambatan dalam proses/mekanisme kerjasama ini.
8. Secara keseluruhan, mekanisme kerjasama yang ada selama ini telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hambatan. Dengan mekanisme seperti ini, maka hasil yang telah dicapai dalam pengadaan bahan siaran pedesaan juga telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/kelompok pendengar.

DAFTAR PUSTAKA

- Depari, E., dan Colin Mac Andrews. 1978. Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dewan Pembina Siaran Pedesaan Kabupaten DT.II Bogor. 1983. Laporan Perkembangan Siaran Pedesaan tahun 1981 dan 1982. Tidak dipublikasikan.
- Dinas Peternakan Propinsi DT. I Jawa Barat. 1983. Laporan Tahunan 1982/1983. Bandung.
- Direktorat Jendral Peternakan. 1983. Rancangan Pembangunan Peternakan 1984-1988. Jakarta.
- Direktorat Penyuluhan Pertanian Rakyat. 1975. Pedoman Siaran Pedesaan. Pasar Minggu. Jakarta.
- Gunardi. 1981. Dasar-dasar Penyuluhan. Kumpulan Bahan Bacaan. Departemen SOSEK, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- _____. 1979. Laporan Penelitian Siaran Pedesaan. Lembaga Penelitian Sosial Pedesaan. IPB - DEPPEN RI. Bogor.
- Koentjaraningrat. 1977. Metoda-metoda Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia. Jakarta.
- Lazarsfeld, P.F. 1960. Mass Media and Personal Influence. VOA Series. Mass Communication Series.
- Lionberger, H.F. 1960. Adoption of New Ideas and Practices. IOWA State University Press.
- Marlina, Ira. 1982. Program Siaran Pedesaan "mBangun Desa" Media Televisi dengan Kegiatan Kelompok Pendengar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya Ilmiah. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Maryanie, M. 1982. Kajian Pelaksanaan Program Penyuluhan melalui Penyelenggaraan Siaran Pedesaan di RRI Stasiun Bandung. Karya Ilmiah. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Pesson, Lynn L. 1966. Extension Program Planning with Participation of Client, *in* Sandres, H.C., editor, The Cooperation Extension Service. Prentice Hall, Inc. Englewood. New York.
- Rogers, E.M., dan F.F. Shoemaker. 1971. Communication of Inovation. The Free Press. New York.

- Sayogyo. 1977. Laporan Penelitian Siaran Pedesaan. Lembaga Penelitian Sosial Pedesaan. IPB - DEPPEN RI. Bogor.
- Schoorl, J.W. 1981. Modernisasi. PT. Gramedia. Jakarta.
- Slamet, M., dan Pang S. Asngari. 1969. Penyuluhan Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sukanto. 1981. Beberapa Masalah Komunikasi Interpersonal dalam Masyarakat Pedesaan. Analisa no. 11. CSIS. Jakarta.
- Sutjipata, Nyoman. 1982. Hubungan Pelaksanaan Penyuluhan Sistem Laku dan Keberhasilan PPL dalam Melaksanakan Tugasnya di Bali. Thesis. Fakultas Pasca Sarjana. IPB. Bogor.
- Suwardi, Herman. 1972. Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian, Terutama Padi. Universitas Pajajaran. Bandung.
- _____. 1980. Membangun Desa Melalui Radio. Prisma no. 3. LP3ES. Jakarta.
- Vitayala, Aida. 1974. Sumbangan Siaran Pedesaan dalam Rangka Penyuluhan Pertanian di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Thesis. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Wiriaatmadja, S. 1979. Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian CV. Yasaguna. Jakarta.
- Wuradji. 1980. Efektifitas Media Tertulis dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Perubahan Sikap tentang Metoda Tubektomi Laparoskopi. Disertasi. SPS-IPB. Bogor.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Persentase Penyiaran Materi Siaran Pedesaan
RRI Stasiun Regional II. Bogor.

M a t e r i	Jumlah		Persen	
	'81/'82	'82/'83	'81/'82	'82/'83
Pertanian	64	98	32.55	32.13
Peternakan	28	21	10.98	6.88
Perikanan	23	31	9.02	10.16
Perkebunan	15	17	5.88	5.57
Kehutanan	5	14	1.96	4.59
Lingkungan Hidup	10	10	3.92	3.28
Kesehatan/Trans./KB	53	60	20.78	19.68
Pendidikan	12	19	4.71	6.23
Koperasi/Tabanas/Bimas	8	19	3.14	6.23
Industri	6	3	2.35	0.98
PKK/LKMD	10	6	3.92	1.97
Agraria	-	1	-	0.33
Lain-lain	2	6	0.79	1.97
T o t a l	255	305	100.00	100.00

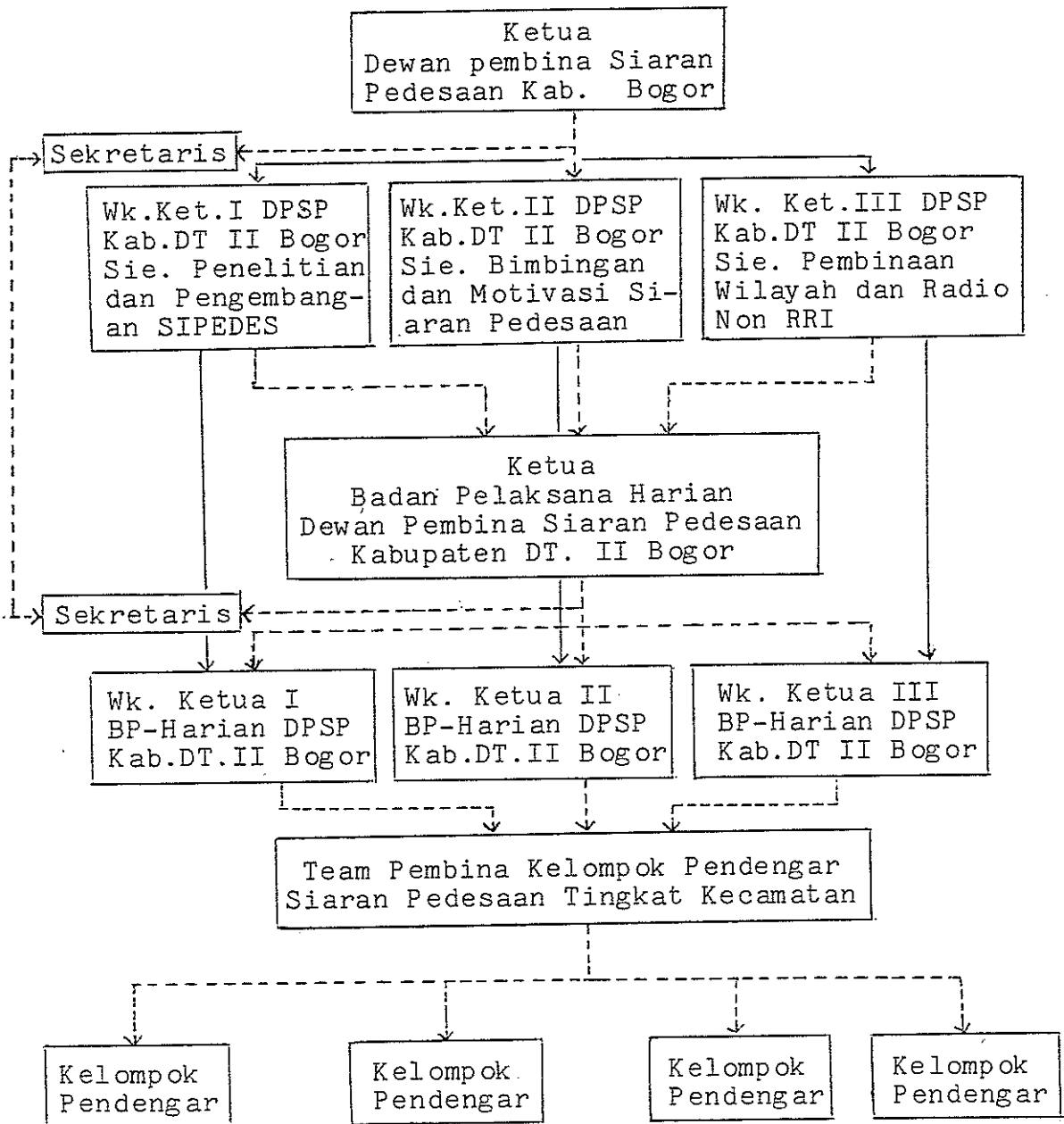
Sumber : Naskah Siaran Pedesaan RRI Stasiun Regional II
Bogor, 1983.

Lampiran 2. Daftar Anggota Penanggung Jawab Acara Siaran Pedesaan melalui RRI Sta. Reg. II Bogor dalam BP-Harian DPSP Kabupaten DT II Bogor

No.	Hari Siaran Pedesaan	Instansi Pengisi Sipedes	Keterangan
I	S e n i n	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Transmigrasi 2. Bina Guna Depnaker 3. Kantor Perburuhan 4. Dinas Sosial Kab. Bogor 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 6. BKKBN Kab. Bogor 	Koordinator : Kantor Transmigrasi
II	S e l a s a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian Kab. Bogor 2. Dinas Peternakan Kab. Bogor 3. Dinas Perikanan Kab. Bogor 4. Perhutani Bogor 5. Perkebunan Kab. Bogor 6. HKTI Kab. Bogor 	
III	R a b u	<ol style="list-style-type: none"> 1. I P B 2. Biotrop Bogor 3. B I P 4. Agraria Kab. Bogor 5. DEPDIKBUD dan Dinas P & K Kab. Bogor 	Koord. : I P B
IV	K a m i s	<ol style="list-style-type: none"> 1. B R I Bogor 2. Kantor Perdagangan 3. Kantor Koperasi Kab. Bogor 4. Kantor Perindustrian 	Koord. : Perindustrian Kab. Bogor
V	J u m a t	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humas Protokol Pem. Kab. Bogor 2. Humas DPRD Kab. Bogor 3. Kandep Agama Kab. Bogor 4. M D I Kab. Bogor 5. Deppen Kab./Kodya Bogor 	Koord. : DEPPEN Kab Bogor
VI	S a b t u	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dharmawanita Kab. Bogor 2. Pramuka Kab. Bogor 3. K N P I Kab. Bogor 4. Bangdes Kab. Bogor 5. P K K Kab. Bogor 	Koord. : Dharmawanita

Sumber : DPSP Kabupaten Bogor, 1983.

Lampiran Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPSP Kabupaten DT II Bogor



Sumber : DPSP Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berdasarkan SK Bupati No. : TL.011.2/183/Kpts/Huk/1980, 1983.